



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 6
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat/ke-	: Audiensi / Ke- 2
Dengan	: Majelis Ormas Islam
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Kamis, 6 September 2018
Waktu	: Pukul 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Mendengar Masukan
Hadir	: orang dari 50 orang Anggota

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Audiensi Komisi VIII DPR RI pada pukul 09.08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Audiensi Komisi VIII DPR RI dengan Majelis Ormas Islam dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum., sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Audiensi Komisi VIII DPR RI bersama Majelis Ormas Islam (MOI) terkait Kehidupan Keberagamaan dan Pendidikan Keagamaan Islam, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Majelis Ormas Islam (MOI) memiliki anggota 13 Ormas: Persatuan Umat Islam, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Al-Washliyyah, Hidayatullah, Syarikat Islam, Badan Koordinasi Pesantren Indonesia, Mathla'ul Anwar, Ikatan Dai Indonesia, Al-Ittahiyyah, dan lainnya.
2. Majelis Ormas Islam menyampaikan aspirasi dukungan peningkatan anggaran untuk pembinaan Organisasi Masyarakat Islam yang selama ini dirasakan tidak memadai untuk pengembangan dakwah Islam.
3. Majelis Ormas Islam meminta agar keberadaan MOI diakui secara nasional, bahkan bila perlu mendapat dukungan dalam bentuk Undang-undang.
4. Majelis Ormas Islam meminta adanya pemerataan dalam hal pelibatan anggota Majelis Ormas Islam dalam rombongan Amirul Haj yang selama ini hanya terbatas pada ormas besar lainnya.
5. Majelis Ormas Islam menyampaikan informasi mengenai susahnyanya pengurusan izin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dimiliki oleh anggota MOI ke Kementerian Agama RI. Seakan terdapat diskriminasi karena bukan dari ormas besar utama.
6. Majelis Ormas Islam menyampaikan mengenai pentingnya perhatian pada peningkatan anggaran Madrasah Diniyyah sebagai garda terdepan pendidikan Islam dan kehidupan keberagamaan di Indonesia.
7. Komisi VIII DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari Majelis Ormas Islam dengan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 10.15 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

ttd

Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.